# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " **Penerapan Ketentuan Pasal 132 a Ayat (2) HIR Terhadap Penambahan Materi Gugatan dalam Memori Banding (Studi Putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby)**" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR tentang larangan penambahan materi gugatan dalam memori banding, bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengabulkan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan di pengadilan tingkat pertama pada putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby, dan bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan dalam pengadilan tingkat pertama.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumenter dan telaah pustaka. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan tehnik kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

Peneliti menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *māḍiyyah* kepada istri pada putusan No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Padahal gugatan tersebut diajukan dalam tingkat banding dan bertentangan dengan ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa dalam sengketa perceraian, gugatan rekonpensi merupakan gugatan *lex specialis* dari gugatan pada umumnya, karena dalam sengketa perceraian selama sidang tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya, sehingga tidak mengajukan gugatan balik/rekonpensi.

Melihat posisi kasus diatas sudah seharusnya bekas suami berkewajiban membayar nafkah *māḍiyyah* kepada bekas istrinya, namun dasar pertimbangan hukum majelis hakim yang digunakan adalah tidak tepat dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan tingkat pertama.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait perubahan gugatan, khususnya perubahan gugatan dalam tingkat banding. Dan hakim selaku pemegang kekuasaan dalam memutuskan perkara hendaknya harus menggunakan pertimbangan hukum yang lebih tepat dan memberi wawasan kepada para pihak, terkait perceraian dan hak-hak kebendaan istri pasca perceraian agar diajukan sesuai dengan tingkat dan aturannya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id